

---

**Pengaruh Regulasi Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, SiLPA Dan Perubahan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran Di Kota Tebing Tinggi  
(Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kota Tebing Tinggi)**

Hanggara Setiawan

Muhammad Yusra<sup>\*2</sup>

Amru Usman<sup>\*3</sup>, Arliansyah<sup>\*4</sup>

[hanggara.180420058@mhs.unimal.ac.id](mailto:hanggara.180420058@mhs.unimal.ac.id)<sup>1</sup>, [mysura@unimal.ac.id](mailto:mysura@unimal.ac.id)<sup>2</sup>, [amru@unimal.ac.id](mailto:amru@unimal.ac.id)<sup>3</sup>,

[Arliansyah@unimal.ac.id](mailto:Arliansyah@unimal.ac.id)<sup>4</sup>

Program Studi Akuntansi, Universitas Malikussaleh, Kota Lhokseumawe

Jl. Kampus Unimal Bukit Indah, Blang Pulo, Kec. Muara Satu, Kota Lhokseumawe, Aceh, 24355

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh regulasi keuangan daerah, sistem pengendalian internal daerah, silpa, dan perubahan anggaran terhadap penyerapan anggaran di Kota Tebing Tinggi. Penelitian ini dilakukan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Tebing Tinggi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dengan cara membagikan kuesioner kepada 87 responden bagian Kepala SKPD, Kasubbag Keuangan, PPTK, dan Bendahara Pengeluaran pada SKPD di Kota Tebing Tinggi, metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Regulasi keuangan daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran, (2) sistem pengendalian internal pemerintah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran, (3) SiLPA secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran, (4) perubahan anggaran secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran di Kota Tebing Tinggi

**Kata kunci :** Regulasi Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, SiLPA, Perubahan Anggaran, Penyerapan Anggaran

**Abstract**

This study aims to determine how the influence of regional financial regulations, regional internal control, silpa, and budget changes on budget absorption in Tebing Tinggi City. This research was conducted at the Regional Work Unit (SKPD) in the City of Tebing Tinggi. The data used in this study is primary data obtained by distributing questionnaires to 87 respondents from the Head of SKPD, Head of Sub-Division of Finance, PPTK, and Treasurer of Expenditures at SKPD in Tebing Tinggi City. The data analysis method used is multiple linear regression analysis. The results showed that (1) regional financial regulation partially had a positive and significant effect on budget absorption, (2) the government's internal control system partially had a positive and significant effect on budget absorption, (3) SiLPA partially had a positive and positive effect on budget absorption, (4) partial budget changes have a positive and significant effect on budget absorption in Tebing Tinggi City.

**Keywords :** Regional Financial Regulation, Government Internal Control System, SiLPA, Budget Change, Budget Absorption

## PENDAHULUAN

Di suatu pemerintahan anggaran menjadi sangat penting serta relevan, karena akan berdampak pada kinerja pemerintah yang dikaitkan dengan fungsi sebuah pemerintahan dalam memberi pelayanan kepada masyarakat. Anggaran berfungsi sebagai alat yang menentukan target yang akan dicapai pemerintah dalam satu periode waktu. Dan juga sebagai alat pengendalian yang mengindikasikan alokasi sumber dana publik untuk dibelanjakan tentunya dengan persetujuan para legislatif terlebih dahulu. Namun pada saat ini, dalam pelaksanaan anggaran mengalami berbagai kendala yang dihadapi oleh banyak pemerintah daerah yaitu banyaknya anggaran sisa yang menumpuk di akhir tahun. Hal ini menjadi bahasan yang menarik karena penyerapan anggaran secara umum hanya memiliki akselerasi tinggi pada saat akhir tahun. Percepatan realisasi tersebut bukan tidak mungkin akan membuat penggunaan anggaran menjadi tidak tepat sasaran dalam pengimpletasiannya. Serapan anggaran yang rendah yang tersebut nantinya akan menjadi tolak ukur kinerja pemerintah daerah.

Saat ini penyerapan anggaran menjadi salah satu hal yang dibahas di seluruh pemerintahan daerah. Menurut Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani mengatakan rendahnya serapan anggaran pemerintah daerah pada tahun 2021 sangatlah rendah, serapan anggaran ini rendah sekali apalagi ironisnya dimana anggaran ada, namun kegiatan tidak terjadi karena ada peraturan yang berbelit, kekhawatiran penggunaan anggaran dan ada pemerintah yang melakukan perubahan dalam anggarannya (Saputra, 2021).

Salah satu daerah yang tahun ini mengalami kendala dalam serapan anggaran yaitu pemerintah daerah Kota Tebing Tinggi . Menurut Walikota Tebing Tinggi, Kurang optimalnya penyerapan anggaran di daerah kita akan sangat berdampak pada terhambatnya pembangunan. Rendahnya penyerapan anggaran tahun ini sering disebabkan karena pihak yang terlibat dalam program anggaran ketakutan dalam menjalankan program tersebut. Hal ini merupakan penyebab klasik rendahnya serapan anggaran di Kota Tebing Tinggi. Sebab lainnya karena keterlambatan pengajuan anggaran yang mana sudah seharusnya selesai pada awal tahun (Pasaribu, 2021).

Pada rapat yang diadakan BPKPD di Pemerintah Kota Tebing Tinggi tentang rapat koordinasi percepatan penyerapan anggaran belanja daerah dan realisasi pendapatan asli daerah, Dalam paparannya Plt. Kepala BPKPD Bapak Sri Imbang Jaya Putra mengungkapkan per bulan oktober 2021 penyerapan anggaran belanja daerah Kota Tebing Tinggi hanya 51,98 %. Kendati demikian itu merupakan persentase yang rendah pada triwulan ke IV yang mana dalam dua bulan lagi adalah akhir tahun. Diketahui para serapan Pajak daerah hanya mencapai 77,29% dan ada tiga pajak yang belum tercapai yakni pajak hiburan, pajak reklame, dan pajak PBB-P2. Dan untuk Retribusi daerah hanya mencapai 48,17 % dari target awal. Hingga memasuki triwulan ke IV masih belum banyak berubah. Kedepannya diharapkan pihaknya dapat memaksimalkan anggaran dan dapat meningkatkan kinerja Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) secara baik dan optimal ([bpkpad.tebingtinggikota.go.id](http://bpkpad.tebingtinggikota.go.id)).

Persentase diatas dapat dikatakan sangat rendah dalam kategori serapan anggaran yang baik. Hal ini dapat dilihat proses penyerapan anggaran pada awal triwulan IV kurang dari 80 %. Hal ini menyatakan bahwa penyerapan anggaran tersebut masih tergolong rendah. Hal lain yang menyebabkan penyerapan anggaran ini rendah karena ada beberapa perubahan anggaran di perangkat daerah seperti contoh penghematan anggaran yang berdasarkan perubahan kebijakan pemerintah.

Ketika penyerapan anggaran rendah terealisasi atau gagal memenuhi target, berarti telah terjadi kesalahan dalam pengalokasian anggaran. Penyerapan anggaran yang terbelang lambat ini sangat perlu mendapat perhatian yang sangat serius dari pemerintah terutama untuk jenis belanja barang dan belanja modal. Belanja tersebut dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui konsumsi, peningkatan produktivitas tenaga kerja, peningkatan kemakmuran nyata, dan pelayanan masyarakat.

**Tabel 1. 1**  
**Perbandingan Anggaran Pagu, Realisasi Anggaran dan Persentasenya**

No	Tahun Anggaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2018	Rp. 704,17 M	Rp. 717,78 M	101,93
2	2019	Rp. 740,51 M	Rp. 713,31 M	96.20
3	2020	Rp. 600,93 M	Rp. 659,64 M	109.77
4	2021	Rp. 738,52 M	Rp. 692,32 M	93.74

Sumber : (Djpk.kemenkeu.go.id ( Data diolah penulis 2022)

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, dapat dilihat selama kurun waktu empat tahun dari tahun 2018 sampai dengan 2021 menunjukkan bahwa anggaran dan realisasi anggarannya naik turun, terutama pada tahun 2021 merupakan persentase realisasi anggaran yang rendah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Fenomena penyerapan anggaran yang terjadi saat ini adalah cenderung rendah pada awal tahun anggaran kemudian hampir merata sampai dengan pertengahan tahun anggaran, tetapi melonjak pada periode akhir triwulan keempat. Trend penyerapan anggaran ini telah menjadi pola yang selalu terjadi pada setiap pelaksanaan anggaran. Pada awal tahun anggaran, penyerapan anggaran rendah karena hanya terbatas pada kegiatan operasional yang bersifat rutin seperti tagihan belanja pegawai, belanja barang dan jasa , ataupun belanja pemeliharaan. Rendahnya serapan anggaran pada awal tahun terjadi karena banyak kegiatan yang sudah ditetapkan dalam pelaksanaan anggaran. Terlebih lagi para satuan kerja terikat oleh regulasi dan sistem pengendalian internal yang mana hal itu yang menyebabkan mereka belum dapat melaksanakan anggaran secara menyeluruh. Apalagi ada pemerintah daerah yang melakukan perubahan anggaran demi menyasiasi pelaksanaan anggaran dapat terealisasi sepenuhnya tetapi hal yang berbeda pada akhir tahun, para satuan kerja perangkat daerah berusaha melakukan percepatan realisasi anggaran terhadap perintah perintah yang telah diajukan oleh pemerintah daerah sehingga tidak mengakibatkan sisa anggaran untuk tahun berikutnya.

Berbagai penelitian terdahulu mengenai penyerapan anggaran sudah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya seperti, penelitian Sanjaya (2018) menunjukkan bahwa regulasi keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran. Di penelitian Oktaliza et al. (2020) menyatakan bahwa regulasi keuangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan anggaran di Provinsi Riau. Dalam penelitian Aldina (2018) menyimpulkan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap penyerapan anggaran pada SKPD di Kota Padang. Penelitian Rambe (2021) menunjukkan bahwa sisa anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran di Kota Medan.

Di dalam penelitian Pramudya (2021) dan juga menyebutkan bahwa perubahan anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap penyerapan anggaran pada Instansi Badan Layanan Umum. Sedangkan penelitian yang dilakukan Mandasari (2019) menunjukkan bahwa perubahan anggaran memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap penyerapan anggaran di Kota Palembang.

Berdasarkan beberapa uraian di atas, penulis tertarik untuk mengangkat topik penelitian yang berjudul “ **Pengaruh Regulasi Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, SiLPA, dan Perubahan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran di Kota Tebing Tinggi** ” (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi).

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Landasan Teori**

#### **Teori Stakeholders**

Pengertian stakeholder menurut Freeman and McVea (2001) adalah sekelompok orang atau individu yang diidentifikasi dapat mempengaruhi dan dapat dipengaruhi oleh suatu tujuan pencapaian tertentu. Menurut para stakeholder itu adalah para pemegang saham, para supplier, bank, para customer, pemerintah dan komunitas pemegang peranan penting dalam organisasi (berperan sebagai Stakeholder). Teori stakeholders dalam penelitian ini adalah teori yang menjelaskan hubungan-hubungan timbal balik antara pemerintah dan para pihak lain terkait yang ada di dalamnya. Pemerintah sebagai stakeholder memiliki peran penting untuk kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan pemerintah dalam proses memajukan suatu daerah. Pemerintah diharapkan mampu menggunakan sumber daya yang ada untuk memajukan pembangunan secara maksimal untuk kepentingan rakyat daerahnya.

#### **Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang membahas mengenai pengaruh regulasi keuangan daerah, sistem pengendalian internal pemerintah, SiLPA, dan perubahan anggaran yang dilakukan oleh:

Penelitian Handayani (2017), Oktaliza et al. (2020), Mandasari (2019) memperoleh hasil bahwa regulasi keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap penyerapan anggaran. Sedangkan penelitian Sanjaya (2018) memperoleh hasil penelitian bahwa regulasi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.

Penelitian yang dilakukan oleh (Aldina, 2018) memperoleh hasil bahwa sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif dan signifikansi terhadap penyerapan anggaran.

Penelitian yang dilakukan oleh Handayani (2017), Rambe (2021), Mandasari (2019) memperoleh hasil bahwa SiLPA berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penyerapan anggaran.

Penelitian yang dilakukan oleh Pramudya (2021) dan Rambe (2021) memperoleh hasil perubahan anggaran berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Mandasari, 2019) yang menunjukkan bahwa perubahan anggaran tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.

#### **Hubungan Antar Variabel**

### **Hubungan Regulasi Keuangan Daerah terhadap Penyerapan Anggaran**

Menurut Sanjaya (2018) menyatakan bahwa regulasi di bidang keuangan daerah termasuk salah satu faktor yang menjadi penyebab rendahnya tingkat serapan anggaran belanja. Faktor regulasi yang mempengaruhi penyerapan anggaran yaitu dilihat dari bagaimana pemahaman dan kepatuhan setiap organisasi perangkat daerah mengenai peraturan yang ada. Seperti penetapan peraturan perundang-undangan yang mengenai pendapatan dan pengeluaran daerah harus dibentuk dan dipatuhi oleh setiap pengguna anggaran, agar setiap dana publik yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan dengan landasan hukum yang jelas. Dan menurut Ningtyas (2020) Regulasi terkait dengan peraturan pemerintah pusat maupun peraturan daerah, dimana permasalahannya terjadi mengenai pergantian regulasi, pemahaman dan kepatuhan ASN, sehingga menyebabkan penyerapan anggaran menjadi terganggu. Semakin tinggi tingkat kepatuhan dan pemahaman terhadap regulasi akan meningkatkan penyerapan anggaran belanja.

### **Hubungan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Penyerapan Anggaran**

Hasil penelitian Asniarti (2020) menyatakan bahwa fungsi pengendalian anggaran dapat dilakukan melalui pembuatan sistem pengendalian intern pemerintah serta pemberdayaan auditor internal pemerintah (APIP) yang efektif. Pihak internal satuan kerja pemerintah harus mampu mengendalikan proses pelaksanaan akuntabilitas melalui sistem pelaporan yang telah disajikan misalnya dalam pembuatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang dapat digunakan sebagai alat pengendalian dan pengawasan pada setiap kegiatan atau program dan kebijakan dalam pencairan dana anggaran oleh pemerintah dalam bentuk serapan anggaran untuk mewujudkan visi dan misi pemerintah dalam memenuhi dan menjaga kesinambungan program kesejahteraan rakyat. Dan menurut (Aldina, 2018) karena dengan adanya suatu sistem yang mengendalikan kegiatan atau program dan kebijakan pemerintah yang menggunakan dana anggaran bisa terlaksana dengan efektif dan efisien serta terkendali.

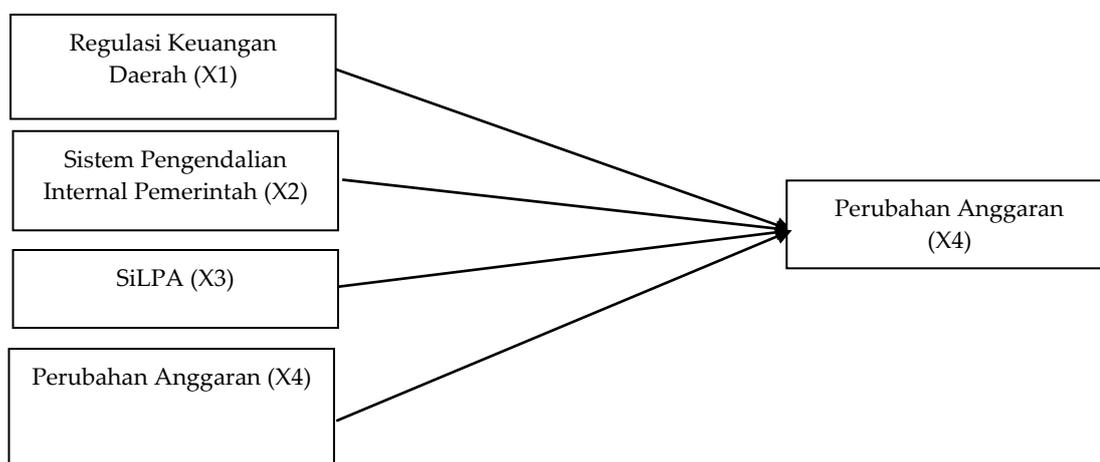
### **Hubungan SiLPA terhadap Penyerapan Anggaran**

Sisa anggaran adalah dana milik pemerintah yang belum terpakai selama tahun anggaran atau masih tersisa pada akhir tahun anggaran. Sisa anggaran akan menjadi penerimaan ditahun berikutnya dan bebas untuk dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan tahun berjalan. Sisa anggaran mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan anggarannya serta keakuratan estimasi pendapatan, belanja dan pembiayaan yang ditetapkan sebelum pelaksanaan anggaran. Sisa anggaran yang besar menunjukkan rendahnya daya serap anggaran untuk belanja dan atau tingginya kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatannya di atas target yang telah ditetapkan (Abdullah & Nazry, 2015). Dan menurut (Mandasari, 2019a) Semakin besar SiLPA, menunjukan kekurangcermatan penganggaran atau perencanaan yang kurang baik serta adanya kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan anggaran. Rasio SiLPA terhadap belanja menunjukan porsi belanja yang tertunda atau anggaran yang tidak terserap. Menurut penelitian terdahulu sisa anggaran tahun lalu dapat mengakibatkan rendahnya realisasi (serapan) SKPD diakibatkan kurangnya kesiapan aparatur baik secara kualitas maupun kuantitas dan akibat penambahan kegiatan yang bersumber dari sisa anggaran tahun lalu tersebut.

## Hubungan Perubahan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran

Menurut Mandasari (2019) Keterlambatan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan mengakibatkan berkurangnya waktu bagi eksekutif untuk merealisasikan program kegiatan dan pembangunan yang telah direncanakan. Selain itu, keterlambatan dalam menetapkan APBD juga dapat menimbulkan kerugian bagi pemerintah daerah yaitu berupa sanksi penundaan dana perimbangan dari pemerintah pusat. Hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap penyerapan anggaran pemerintah daerah. perubahan anggaran yang dilaksanakan bertujuan untuk menyesuaikan anggaran yang dibelanjakan untuk membuat perencanaan program dan kegiatan menjadi lebih efektif dan efisien. Penyesuaian atas penerimaan dilakukan agar dana yang ada dapat dioptimalkan penggunaannya. Perubahan anggaran ini tentunya akan memengaruhi penyerapan anggaran. Sehingga dapat disimpulkan dengan adanya perubahan anggaran dalam rencana keuangan awal dapat meminimalisir terjadinya anggaran sisa dalam satu periode yang akan mempengaruhi penyerapan anggaran tersebut.

## Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1  
Kerangka Pemikiran

## Hipotesis

Berdasarkan uraian pada kerangka pemikiran dan didukung dengan teori yang ada maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H<sub>1</sub>: Regulasi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran di Kota Tebing Tinggi.
- H<sub>2</sub>: Sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran di kota Tebing Tinggi.
- H<sub>3</sub>: SiLPA berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran di Kota Tebing Tinggi.
- H<sub>4</sub>: Perubahan anggaran berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran di Kota Tebing Tinggi.

## **METODE PENELITIAN**

### **Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terletak di Pemerintahan Kota Tebing Tinggi. Waktu pelaksanaan penelitian ini dilakukan dalam jangka waktu 30 hari kerja yaitu pada 04 April– 04 Mei 2022.

### **Populasi Dan Sampel**

#### **Populasi**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2019). Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa populasi merupakan keseluruhan objek yang menjadi sasaran penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah pejabat struktural atau pegawai yang menduduki jabatan berkaitan dengan anggaran yang bekerja di 31 SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang ada di Kota Tebing Tinggi, yang terdiri dari 17 Dinas, 5 Badan, 1 Inspektorat dan 1 Sekretariat DPRD, 1 RSUD, 1 Satpol PP dan 5 Kecamatan. Berdasarkan rekomendasi dari Pemerintah Kota Tebing Tinggi tentang responden ditia SKPD yang dilihat dari keadaan dan meminimalisir kendala penelitian dilapangan, peneliti melakukan pengambilan responden yang beragam dari 1,2,3, sampai dengan 4 responden sesuai jumlah responden yang diperlukan. Adapun responden dalam penelitian ini yaitu Kepala SKPD, Kasubbag Keuangan, PPTK, dan Bendahara Pengeluaran yang berjumlah 87 responden.

#### **Sampel**

Sampel merupakan suatu sub kelompok dari populasi yang dipilih untuk digunakan dalam penelitian (Sugiyono, 2019). Sampel penelitian ini adalah seluruh anggota populasi, yaitu 87 responden. Metode yang digunakan untuk pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah metode *nonprobability sampling* dengan jenis sampel jenuh dimana seluruh populasi dijadikan sampel.

#### **Teknik Pengumpulan Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Kuesioner yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan dan pernyataan tertulis kepada responden untuk kemudian dijawab (Sugiyono, 2015:308).

#### **Definisi Operasional Variabel**

Variabel adalah karakteristik individu atau objek yang dapat mempunyai nilai, skor, ukuran yang berbeda untuk individu atau objek yang berbeda (Abdullah & Nazry, 2015). Variabel dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok yaitu (1) variabel independen dan (2) variabel dependen. Variabel dependen merupakan variabel yang menjadi perhatian utama peneliti. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Penyerapan Anggaran (Y) dan variabel independen dalam penelitian ini adalah Regulasi Keuangan Daerah ( $X_1$ ) dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah ( $X_2$ ), SiLPA ( $X_3$ ), dan Perubahan Anggaran ( $X_4$ ).

Variabel penelitian akan diukur dengan menggunakan skala ordinal dan alat ukur likert. Skala ordinal adalah skala yang sudah memiliki tingkatan namun jarak antar tingkatan belum pasti (Ghozali, 2016). Setiap item dari masing-masing variabel dijadikan dasar untuk pembuatan kuesioner:

1. Sangat Setuju (SS) skor 5
2. Setuju (S) skor 4
3. Netral (N) skor 3
4. Tidak Setuju (TS) skor 2
5. Sangat Tidak Setuju (STS) skor 1

## **Definisi dan Pengukuran Variabel**

### **Variabel Dependen (Y)**

#### **Penyerapan Anggaran**

Menurut Sugiyono (2019:39) mendefinisikan variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penyerapan anggaran.

Menurut Syahwildan and Damayanti (2021) penyerapan anggaran merupakan gambaran kecakapan pemerintah daerah pada saat menjalankan dan memberikan pertanggungjawaban pada tiap aktivitas yang merupakan akumulasi dari penyerapan anggaran yang telah dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah.

Seluruh pengeluaran belanja pemerintah daerah yang dapat direalisasikan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam APBD. Indikator regulasi keuangan daerah menurut dwiyana (2017), yaitu: 1) Pagu Anggaran; 2) Realisasi Anggaran

### **Variabel Independen (X)**

#### **Regulasi Keuangan Daerah**

Menurut Handayani (2017) Regulasi dibidang keuangan daerah didefinisikan sebagai seperangkat aturan yang mengatur tentang pelaksanaan anggaran yang harus dipahami, dipelajari dan dipatuhi oleh pengguna anggaran SKPD. Dalam hal tujuan, sistem regulasi keuangan daerah adalah sebuah sistem yang dibuat untuk mengendalikan pelaksanaan siklus keuangan daerah agar segala tindakan atas pengendalian tersebut dapat dirangkum dalam peraturan tertentu. Indikator regulasi keuangan daerah menurut Handayani (2017), 1) Pemahaman Pengguna Anggaran, 2) Mempelajari Regulasi, 3) Kepatuhan terhadap Regulasi

### **Sistem Pengendalian Internal Pemerintah**

Menurut Kennedy *et al.* (2020) Sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) merupakan suatu upaya untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian kecurangan. SPIP merupakan suatu upaya pemerintah dalam memberikan pedoman bagi pemerintah daerah agar pengelolaan keuangan dapat diimplementasikan secara akuntabel dan transparan. Hal-hal pokok yang penting dalam mewujudkan pengendalian yang efektif yaitu adanya perlindungan fisik terhadap harta, adanya pemisahan fungsi organisasi yang saling berkaitan, serta adanya audit trail yang memadai; dan sumber daya manusia yang optimal.

Menurut PP No 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dan berikut adalah indikator dari SPIP menurut PP No. 60 Tahun 2008, yaitu: 1) Lingkungan pengendalian; 2) Penilaian resiko; 3) Kegiatan pengendalian; 4) Informasi dan komunikasi; dan 5) Pemantauan pengendalian intern.

### **SiLPA**

Dalam penelitian Halim (2008) SiLPA merupakan sumber pembiayaan yang berasal dari sisa anggaran tahun lalu yang mencakup sumber penghematan belanja, kewajiban pada pihak ketiga yang sampai akhir tahun belum diselesaikan, sisa dana lanjutan, dan semua pelampauan atas penerimaan daerah. Silpa dapat berupa penerimaan PAD, penerimaan dan perimbangan, penerimaan lain lain pendapatan yang sah dan penerimaan pembiayaan. Menurut Fitroh (2020) dan Handayani (2017) mengemukakan untuk mengukur variabel sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) dapat menggunakan indikator yaitu 1) sisa anggaran tahun lalu, 2) jumlah anggaran yang terealisasi, dan 3) sebagai dana cadangan.

### **Perubahan Anggaran**

Menurut Abdullah and Rona (2014) Perubahan Anggaran dapat diartikan sebagai upaya pemerintah daerah untuk menyesuaikan rencana keuangannya dengan perkembangan yang terjadi. Perkembangan dimaksud bisa berimplikasi pada meningkatnya anggaran penerimaan maupun pengeluaran, atau sebaliknya. Namun, bisa juga untuk mengakomodasi pergeseran- pergeseran dalam satu agency atau unit kerja. Rebudgeting adalah proses revisi yang dilakukan pemerintah dalam memperbaharui anggarannya dalam tahun fiskal pelaksanaannya, sehingga berpengaruh besar terhadap alokasi belanja (Rambe, 2018). Menurut Rambe (2018) indikator perubahan anggaran yaitu Keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya pergeseran-pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja.

### **Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda dimana terdapat satu variabel dependen yang diterangkan oleh 4 variabel independen. Menurut Ghozali (2013:277) menyatakan bahwa analisis regresi linear berganda digunakan oleh peneliti bila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana naik maupun turunnya variabel dependen. Bila terdapat dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor memanipulasinya.

Dalam penelitian ini hipotesis disusun untuk menemukan apakah sudah terdapat pengaruh antara aspek rasional terhadap penyerapan anggaran. Oleh karena itu pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Analisis yang digunakan untuk menguji arah hubungan beberapa variabel independen terhadap variabel dependen.

Persamaan regresi untuk menguji hipotesis-hipotesis yang diajukan, dinyatakan dalam model berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Keterangan :

- Y = Penyerapan Anggaran
- A = Konstanta
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$  = Koefisien Regresi
- X<sub>1</sub> = Regulasi Keuangan Daerah
- X<sub>2</sub> = Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
- X<sub>3</sub> = SiLPA
- X<sub>4</sub> = Perubahan Anggaran
- E = Error Term

**PEMBAHASAN**

**Statistik Deskriptif**

**Tabel 4.1**  
**Statistik Deskriptif**

		Statistics				
		Penyerapan Anggaran (Y)	Regulasi Keuangan Daerah (X1)	Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (X2)	SiLPA (X3)	Perubahan Anggaran (X4)
N	Valid	87	87	87	87	87
	Missing	0	0	0	0	0
Mean		24,77	25,43	40,93	31,70	23,05
Std. Error of Mean		,304	,250	,431	,419	,277
Median		25,00	25,00	40,00	32,00	23,00
Std. Deviation		2,831	2,336	4,023	3,912	2,583
Variance		8,016	5,457	16,181	15,305	6,672
Range		10	9	18	22	12
Minimum		19	21	32	17	17
Maximum		29	30	50	39	29
Sum		2155	2212	3561	2758	2005

Sumber: Hasil penelitian diolah, 2022

Dari hasil uji statistik deskriptif pada tabel 4.1 di atas menunjukkan bahwa jumlah pengamatan pada SKPD di Kota Tebing Tinggi adalah 31 SKPD dengan responden sebanyak 87 orang.

Secara deskriptif penyerapan anggaran sebagai variabel dependen memiliki nilai maksimum sebesar 29 dan nilai minimum sebesar 19. Sementara untuk nilai mean variabel penyerapan anggaran adalah sebesar 24,77 sedangkan nilai standar deviasi sebesar 2,831. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dari nilai mean menunjukkan sebaran dari variabel data yang kecil atau tidak ada kesenjangan yang cukup besar.

Regulasi keuangan daerah sebagai variabel independen pertama yang memiliki nilai maksimum sebesar 30 dan nilai minimum sebesar 21. Sementara untuk nilai mean variabel regulasi keuangan daerah adalah sebesar 25,43 sedangkan nilai standar deviasi sebesar 2,336.

Sistem pengendalian internal pemerintah sebagai variabel independen kedua memiliki nilai maksimum sebesar 50 dan nilai minimum sebesar 32. Sementara untuk nilai mean sebesar 40,93 dan standar deviasi sebesar 4,023.

SiLPA sebagai variabel independen ketiga memiliki nilai maksimum sebesar 39 dan nilai minimum sebesar 17. Sedangkan untuk nilai mean sebesar 31,70 dan standar deviasi sebesar 3,912.

Perubahan anggaran sebagai variabel independen keempat memiliki nilai maksimum sebesar 29 dan nilai minimum sebesar 17. Sedangkan untuk nilai mean sebesar 23,05 dan standar deviasi sebesar 2,583. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dari nilai mean menunjukkan sebaran dari variabel data yang kecil atau tidak ada kesenjangan yang cukup besar.

## Uji Kualitas Data

### Uji Validitas

Pengujian validitas untuk setiap pertanyaan-pertanyaan kuesioner dapat terbukti valid jika nilai dari  $r_{hitung}$  lebih besar  $r_{tabel}$ . Nilai  $r_{hitung}$  dilihat dari kolom *corrected item-total correlation* dan nilai  $r_{tabel}$  dapat diperoleh dari *degree of freedom* ( $df = n - 2$ ). Pada setiap pernyataan hasil  $r_{hitung}$  dibandingkan dengan  $r_{tabel}$  di mana  $df = n - 2$  untuk signifikansi 5%,  $n =$  jumlah sampel. Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 87 responden dengan taraf signifikansi 0,05 dan  $df$  sebesar 85 diperoleh nilai  $r_{tabel}$  sebesar 0,1775. Adapun hasil uji validitas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.2**  
**Uji Validitas**

Variabel	$r_{hitung}$	Nilai Signifikansi	$r_{tabel}$	Keterangan
Y1	0,614	0,000	0,1775	Valid
Y2	0,781	0,000	0,1775	Valid
Y3	0,645	0,000	0,1775	Valid
Y4	0,700	0,000	0,1775	Valid
Y5	0,730	0,000	0,1775	Valid
Y6	0,636	0,000	0,1775	Valid
X1.1	0,580	0,000	0,1775	Valid
X1.2	0,557	0,000	0,1775	Valid
X1.3	0,620	0,000	0,1775	Valid
X1.4	0,767	0,000	0,1775	Valid
X1.5	0,790	0,000	0,1775	Valid
X1.6	0,815	0,000	0,1775	Valid
X2.1	0,470	0,000	0,1775	Valid
X2.2	0,727	0,000	0,1775	Valid
X2.3	0,651	0,000	0,1775	Valid
X2.4	0,837	0,000	0,1775	Valid
X2.5	0,755	0,000	0,1775	Valid
X2.6	0,753	0,000	0,1775	Valid
X2.7	0,858	0,000	0,1775	Valid

Variabel	r <sub>Hitung</sub>	Nilai Signifikansi	r <sub>Tabel</sub>	Keterangan
X2.8	0,766	0,000	0.1775	Valid
X2.9	0,799	0,000	0.1775	Valid
X2.10	0,463	0,000	0.1775	Valid
X3.1	0,418	0,000	0.1775	Valid
X3.2	0,523	0,000	0.1775	Valid
X3.3	0,468	0,000	0.1775	Valid
X3.4	0,411	0,000	0.1775	Valid
X3.5	0,415	0,000	0.1775	Valid
X3.6	0,789	0,000	0.1775	Valid
X3.7	0,730	0,000	0.1775	Valid
X3.8	0,802	0,000	0.1775	Valid
X3.9	0,799	0,000	0.1775	Valid
X4.1	0,603	0,000	0.1775	Valid
X4.2	0,532	0,000	0.1775	Valid
X4.3	0,568	0,000	0.1775	Valid
X4.4	0,671	0,000	0.1775	Valid
X4.5	0,711	0,000	0.1775	Valid
X4.6	0,550	0,000	0.1775	Valid

Sumber: Hasil penelitian diolah, 2022

Berdasarkan hasil uji validitas pada tabel 4.2 di atas menunjukkan bahwa semua variabel yaitu penyerapan anggaran, regulasi keuangan daerah, sistem pengendalian internal pemerintah, SiLPA, dan perubahan anggaran memperoleh data yang valid. Hal ini dapat dilihat dari nilai  $r_{hitung}$  masing masing butir pertanyaan lebih besar dari nilai  $r_{tabel}$ . Dapat disimpulkan bahwa semua butir pertanyaan pada variabel dependen, variabel independen dalam penelitian ini adalah valid.

### Uji Reliabilitas

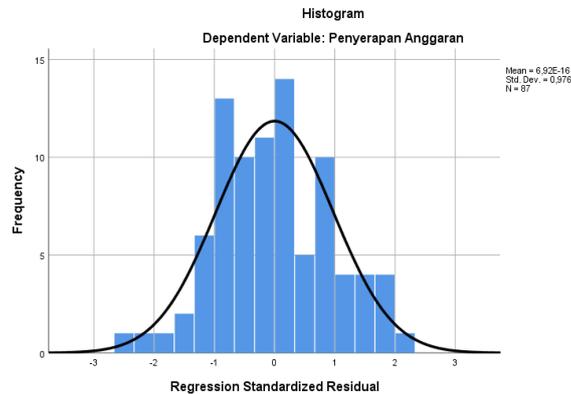
**Tabel 4.3**  
Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Batas Reliabilitas	Keterangan
Penyerapan Anggaran (Y)	0,746	0,60	Reliabel
Regulasi Keuangan Daerah (X1)	0,779	0,60	Reliabel
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (X2)	0,890	0,60	Reliabel
SiLPA (X3)	0,794	0,60	Reliabel
Perubahan Anggaran (X4)	0,644	0,60	Reliabel

Sumber: Hasil penelitian diolah, 2022

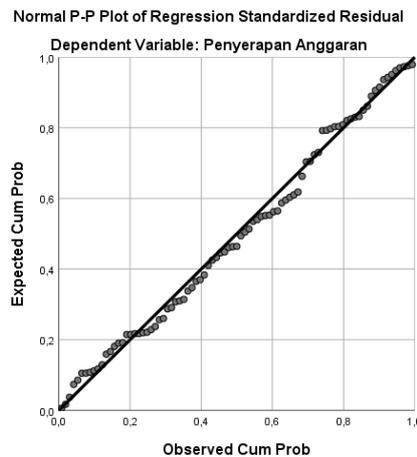
Berdasarkan hasil pengujian seperti yang terlihat pada tabel 4.3 dapat dilihat bahwa semua variabel baik itu variabel penyerapan anggaran, regulasi keuangan daerah, sistem pengendalian internal pemerintah, SiLPA dan perubahan anggaran memiliki data yang reliabel. Hal ini menunjukkan nilai *Cronbach's Alpha* pada semua variabel lebih besar dari 0,60 maka dapat dinyatakan instrumen (kuesioner penelitian) tersebut reliabel.

**Uji Asumsi Kalsik**  
**Uji Normalitas**



**Gambar 4.1**  
**Uji Normalitas**

Berdasarkan gambar 4.1 di atas, maka dapat dilihat hasil uji normalitas dengan menggunakan histogram yang menunjukkan bahwa residual terdistribusi secara normal dan berbentuk simetrik atau tidak melenceng ke kanan atau ke kiri. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini terdistribusi secara normal.



**Gambar 4.2**  
**Uji Normality Probability Plot**

Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan uji *normality probability plot* pada gambar 4.2 di atas, maka dapat dilihat bahwa data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah diagonal atau titik berada di dekat dan mengikuti arah garis diagonalnya. Maka dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini terdistribusi secara normal.

**Tabel 4.4**  
**Uji One sample Kolmogorov Smirnov**

		Unstandardized Residual
N		87
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,44402968
Most Extreme Differences	Absolute	,062
	Positive	,057
	Negative	-,062
Test Statistic		,062
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 <sup>c,d</sup>

Sumber: Hasil penelitian diolah, 2022

Berdasarkan pengujian *one sample kolmogorov smirnov* pada tabel 4.4 di atas, maka dapat dilihat bahwa data dalam penelitian ini memiliki nilai *asymp* lebih besar dari tingkat signifikan yang digunakan yaitu 0,05 ( $0,200 > 0,05$ ). Sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini terdistribusi secara normal. Hasil analisa statistik konsisten dengan uji yang dilakukan dengan analisa grafik.

#### Uji Multikolinearitas

**Tabel 4.5**  
**Uji Multikoloniearitas**

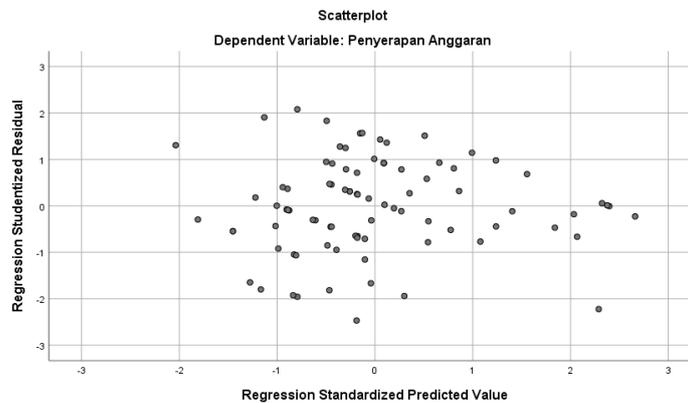
Variabel	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
Regulasi Keuangan Daerah	0,726	1,377	Bebas Multikolinearitas
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	0,998	1,002	Bebas Multikolinearitas
SiLPA	0,782	1,279	Bebas Multikolinearitas
Perubahan Anggaran	0,714	1,400	Bebas Multikolinearitas

Sumber: Hasil penelitian diolah, 2022

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada tabel 4.5 di atas menunjukkan bahwa semua variabel independen yang terdiri dari regulasi keuangan daerah, sistem pengendalian internal pemerintah, SiLPA dan perubahan anggaran memiliki nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini terbebas dari masalah multikolinieritas.

**Uji Heterokedastisitas**  
*Scatterplot*

**Gambar 4.3**  
**Uji Scatterplot**



Berdasarkan hasil grafik scatterplot pada gambar 4.3 di atas menunjukkan bahwa titik-titik yang ada dalam grafik tidak membentuk pola tertentu yang jelas dan titik-titik tersebut tersebar pada gambar tersebut. Hal ini dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

**Metode Glejser**

**Tabel 4.6**  
**Metode Glejser**

No	Variabel	Nilai Signifikan	Keterangan
1	Regulasi Keuangan Daerah	0,172	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
2	Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	0,247	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
3	SiLPA	0,244	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
4	Perubahan Anggaran	0,438	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas

Sumber: Hasil penelitian diolah, 2022

Berdasarkan tabel 4.6 di atas dapat dilihat bahwa semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini memiliki nilai signifikan lebih besar dari tingkat signifikan yang digunakan yaitu 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Hasil uji *Glejser* konsisten dengan hasil uji grafik *scatterplot*.

## Uji Regresi Linear Berganda

Tabel 4.7  
Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-7,432	2,567		-2,896	,005
	Regulasi Keuangan Daerah	,855	,080	,705	10,672	,000
	Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	,088	,040	,125	2,210	,030
	SiLPA	,108	,046	,150	2,348	,021
	Perubahan Anggaran	,149	,073	,136	2,045	,044

a. Dependent Variable: Penyerapan Anggaran

Sumber: Hasil penelitian diolah, 2022

Berdasarkan hasil pengolahan data kuesioner, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = 7,432 + 0,855 X_1 + 0,088 X_2 + 0,108 X_3 + 0,149 X_4 + e$$

Keterangan :

- Y : Penyerapan Anggaran  
 X1 : Regulasi Keuangan Daerah  
 X2 : Sistem Pengendalian Internal Pemerintah  
 X3 : SiLPA  
 X4 : Perubahan Anggaran

1. Nilai a sebesar 7,432 merupakan konstanta atau keadaan saat variabel penyerapan anggaran belum dipengaruhi oleh variabel lainnya atau dalam hal ini yaitu regulasi keuangan daerah ( $X_1$ ) dan sistem pengendalian internal pemerintah ( $X_2$ ), SiLPA ( $X_3$ ), dan perubahan anggaran ( $X_4$ ). Jika variabel independen tidak ada, maka variabel penyerapan anggaran tidak mengalami perubahan.
2. B1 (Nilai Koefisien regresi  $X_1$ ) sebesar 0,855, menunjukkan bahwa variabel regulasi keuangan daerah mempunyai pengaruh yang positif terhadap penyerapan anggaran di Kota Tebing Tinggi yang berarti bahwa setiap terjadi kenaikan variabel regulasi keuangan daerah sebesar 1% maka variabel penyerapan anggaran di Kota Tebing Tinggi meningkat sebesar 85,5% dengan asumsi variabel bebas lainnya dianggap konstan.
3. B2 (Nilai Koefisien regresi  $X_2$ ) sebesar 0,088, menunjukkan bahwa variabel sistem pengendalian internal pemerintah mempunyai pengaruh yang positif terhadap penyerapan anggaran di Kota Tebing Tinggi yang berarti bahwa setiap terjadi kenaikan variabel sistem pengendalian internal pemerintah sebesar 1% maka variabel penyerapan anggaran di Kota Tebing Tinggi meningkat sebesar 8,8% dengan asumsi variabel bebas lainnya dianggap konstan.
4. B3 (Nilai Koefisien regresi  $X_3$ ) sebesar 0,106, menunjukkan bahwa variabel SiLPA mempunyai pengaruh yang positif terhadap penyerapan anggaran di Kota Tebing Tinggi yang berarti bahwa setiap terjadi kenaikan variabel SiLPA sebesar 1% maka variabel penyerapan anggaran di Kota Tebing Tinggi meningkat sebesar 10,6% dengan asumsi variabel bebas lainnya dianggap konstan.

5. B4 (Nilai Koefisien regresi  $X_4$ ) sebesar 0,167, menunjukkan bahwa variabel perubahan anggaran mempunyai pengaruh yang positif terhadap penyerapan anggaran di Kota Tebing Tinggi yang berarti bahwa setiap terjadi kenaikan variabel perubahan anggaran sebesar 1% maka variabel penyerapan anggaran di Kota Tebing Tinggi meningkat sebesar 16,7% dengan asumsi variabel bebas lainnya dianggap konstan.

## Pengujian Hipotesis

### Uji Parsial (Uji T)

**Tabel 4.8**  
**Uji Parsial (Uji T)**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-7,432	2,567		-2,896	,005
	Regulasi Keuangan Daerah	,855	,080	,705	10,672	,000
	Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	,088	,040	,125	2,210	,030
	SiLPA	,108	,046	,150	2,348	,021
	Perubahan Anggaran	,149	,073	,136	2,045	,044

a. Dependent Variable: Penyerapan Anggaran

Sumber: Hasil penelitian diolah, 2022

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial pada tabel 4.8 dan perhitungan  $t_{tabel}$  diatas, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Pada pengujian hipotesis 1 dalam tabel 4.8 diatas, hasil signifikansi untuk regulasi keuangan daerah sebesar 0,000 atau lebih kecil dari tingkat signifikan yang digunakan yaitu 0,05 ( $0,000 < 0,05$ ) dan nilai  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{tabel}$  yaitu 1,98932 ( $10,672 > 1,98932$ ). Sehingga H1 diterima dan dapat disimpulkan bahwa regulasi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran.
2. Pada pengujian hipotesis 2 dalam tabel 4.8 diatas, hasil signifikansi untuk variabel sistem pengendalian internal pemerintah sebesar 0,030 atau lebih kecil dari tingkat signifikan yang digunakan yaitu 0,05 ( $0,030 < 0,05$ ) dan nilai  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{tabel}$  yaitu 1,98932 ( $2,210 > 1,98932$ ). Sehingga H2 diterima dan dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran.
3. Pada pengujian hipotesis 3 dalam tabel 4.8 diatas, hasil signifikansi untuk variabel SiLPA sebesar 0,021 atau lebih kecil dari tingkat signifikan yang digunakan yaitu 0,05 ( $0,021 < 0,05$ ) dan nilai  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{tabel}$  yaitu 1,98932 ( $2,348 > 1,98932$ ). Sehingga H3 diterima dan dapat disimpulkan bahwa SiLPA berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran.
4. Pada pengujian hipotesis 4 dalam tabel 4.8 diatas, hasil signifikansi untuk variabel perubahan anggaran sebesar 0,044 atau lebih kecil dari tingkat signifikan yang digunakan yaitu 0,05 ( $0,044 < 0,05$ ) dan nilai  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{tabel}$  yaitu 1,98932 ( $2,045 > 1,98932$ ). Sehingga H4 diterima dan dapat disimpulkan bahwa perubahan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran.

Oleh karena itu, hipotesis yang menyatakan bahwa regulasi keuangan daerah, sistem pengendalian internal pemerintah, SiLPA dan perubahan anggaran dapat diterima ( $H_1$ ,  $H_2$ ,  $H_3$ , dan  $H_4$  diterima).

### **Pengaruh Regulasi Keuangan Daerah terhadap Penyerapan Anggaran**

Regulasi keuangan daerah memiliki nilai signifikan lebih kecil dari tingkat signifikan yang digunakan serta memiliki nilai  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{tabel}$ . Artinya bahwa regulasi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran di tiap SKPD di Pemerintahan Kota Tebing Tinggi. Hal ini memberikan bukti bahwa regulasi keuangan daerah sudah dipakai dan ditaati oleh pengguna anggaran dalam pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintahan Kota Tebing Tinggi khususnya dalam ruang lingkup satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan PP No 12 Tahun 2019 dan Permendagri No. 77 Tahun 2020.

### **Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Penyerapan Anggaran**

Sistem pengendalian internal pemerintah memiliki nilai signifikan lebih kecil dari tingkat signifikan yang digunakan serta memiliki nilai  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{tabel}$ . Artinya bahwa penerapan sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran di tiap SKPD di Pemerintahan Kota Tebing Tinggi. Hal ini memberikan bukti bahwa penerapan sistem pengendalian internal pada Pemerintahan Kota Tebing Tinggi khususnya dalam ruang lingkup satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan PP No. 60 Tahun 2008.

### **Pengaruh SiLPA terhadap Penyerapan Anggaran**

SiLPA memiliki nilai signifikan lebih kecil dari tingkat signifikan yang digunakan serta memiliki nilai  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{tabel}$ . Artinya bahwa SiLPA berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran di tiap SKPD di Pemerintahan Kota Tebing Tinggi. Pemerintah Kota Tebing Tinggi dalam meminimalkan SiLPA, memerintahkan kepada seluruh SKPD untuk menggunakan anggaran secara baik dan optimal karena semua anggaran ini diharapkan terealisasi semua dan jika terjadi kelebihan anggaran maka para SKPD diharapkan menggunakan anggaran yang lebih tersebut untuk membiayai kegiatan lain yang tertunda dan berguna bagi penyediaan layanan publik.

### **Pengaruh Perubahan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran**

Perubahan Anggaran memiliki nilai signifikan lebih kecil dari tingkat signifikan yang digunakan serta memiliki nilai  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{tabel}$ . Hal ini menunjukkan bahwa Perubahan Anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran di tiap SKPD di Pemerintahan Kota Tebing Tinggi. Dimana perubahan anggaran yang dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi bertujuan untuk menyesuaikan anggaran yang dibelanjakan untuk membuat perencanaan program dan kegiatan menjadi lebih efektif dan efisien. Penyesuaian atas penerimaan dilakukan agar dana yang ada dapat dioptimalkan penggunaannya. Perubahan anggaran ini tentunya akan memengaruhi penyerapan anggaran pada Pemerintahan Kota Tebing Tinggi. Sehingga dapat disimpulkan dengan adanya perubahan anggaran dalam rencana keuangan

awal dapat meminimalisir terjadinya anggaran sisa dalam satu periode yang akan mempengaruhi penyerapan anggaran tersebut.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Berdasarkan pengujian dari hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai bagaimana pengaruh regulasi keuangan daerah, sistem pengendalian internal pemerintah, SiLPA, dan perubahan anggaran terhadap penyerapan anggaran di Kota Tebing Tinggi, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil pengujian hipotesis diperoleh bahwa variabel regulasi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran di Kota Tebing Tinggi.
2. Hasil pengujian hipotesis diperoleh bahwa variabel sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran di Kota Tebing Tinggi.
3. Hasil pengujian hipotesis diperoleh bahwa variabel SiLPA berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran di Kota Tebing Tinggi.
4. Hasil pengujian hipotesis diperoleh bahwa variabel perubahan anggaran berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran di Kota Tebing Tinggi.

### Saran

Melihat kesimpulan sebelumnya terdapat beberapa saran dan pertimbangan yang disajikan dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti tentang penyerapan anggaran disarankan dapat menambah variabel-variabel lainnya yang berhubungan dengan penyerapan anggaran seperti faktor waktu penetapan anggaran dan perencanaan anggaran.
2. Peneliti selanjutnya diharapkan selain menerapkan metode survei melalui penyebaran kuesioner/angket juga melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat.
3. Peneliti selanjutnya diharapkan menambah jumlah sampel dari setiap SKPD di tingkat Provinsi dan kabupaten/kota untuk memperoleh hasil yang lebih representatif.
4. Kepada Pemerintah Kota tebing Tinggi agar dapat memaksimalkan penyerapan anggaran belanja dengan mengikuti regulasi keuangan daerah, meminimalisir SiLPA dalam anggaran, mengoptimalkan perubahan anggaran agar bisa mengalokasikan semua anggaran, serta memaksimalkan kegiatan SPIP sehingga penyerapan penganggaran berbasis kinerja dapat terjaga dan terkontrol dengan baik di lingkungan pemerintahan (performance-based budgeting) pada Pemerintah Kota Tebing Tinggi dapat terus ditingkatkan di masa masa mendatang.

## DAFTAR PUSTAKA

### Daftar Pustaka

Abdullah, S., & Nazry, R. (2015). Analisis Varian Anggaran Pemerintah Daerah. **Jurnal Samudra**

**Ekonomi Dan Bisnis**, 6(2), 272–283.

[http://www.academia.edu/download/35754715/Abdullah\\_\\_\\_Nazry\\_2014\\_Analisis\\_Varian\\_Anggaran\\_Pemerintah\\_Daerah-Penjelasan\\_Empiris\\_dari\\_Perspektif\\_Keagenan.pdf](http://www.academia.edu/download/35754715/Abdullah___Nazry_2014_Analisis_Varian_Anggaran_Pemerintah_Daerah-Penjelasan_Empiris_dari_Perspektif_Keagenan.pdf)

Abdullah, S., & Rona, R. (2014). Pengaruh Sisa Anggaran, Pendapatan Sendiri Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal. *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam STAIN Kudus*, 7(1), 179–202.

Aldina, I. (2018). Pengaruh Kualitas Dipa, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Dan Sistem Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran. Skripsi Universitas Negeri Padang, 14–16.

Almi M.Rambe, F. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*, 1(3), 82–91.

Asniarti. (2020). **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Mdan Dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Sebagai Variabel Moderating**. Tesis. Universitas Sumatera Utara.

bpkpad.tebingtinggikota.go.id. (2021). BPKPD adakan Rapat Koordinasi Percepatan penyerapan Anggaran Belanja Daerah dan Realisasi PAD.

[http://bpkpad.tebingtinggikota.go.id/index.php/berita/detail\\_berita/35/BPKPD\\_adakan\\_rapat\\_koordinasi\\_percepatan\\_penyerapan\\_anggaran\\_belanja\\_darah\\_dan\\_realisai\\_APB](http://bpkpad.tebingtinggikota.go.id/index.php/berita/detail_berita/35/BPKPD_adakan_rapat_koordinasi_percepatan_penyerapan_anggaran_belanja_darah_dan_realisai_APB)

Djpk.kemenkeu.go.id. (2022). No Title. <https://djpk.kemenkeu.go.id/>

Fitroh, M. and I. S. P. (2020). Pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) Terhadap Penetapan Jumlah. *Warta LPM*, 23(2). <https://doi.org/10.23917/warta.v23i2.10950>

Ghozali, I. (2016). **Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23 (8th ed.)**. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Halim, A. (2008). **Akuntansi Keuangan Daerah**, (3rd ed.). Salemba Empat.

Handayani, cut wuri. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Skpd Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014-2015 Dengan Silpa Sebagai Variabel Moderating. **Simposium Nasional AKuntansi XX**, September, 1–19.

Kennedy, Azlina, N., Julita, & Nurulita, S. (2020). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 13(2), 108–117.

Mandasari, N. (2019a). Pengaruh Regulasi Keuangan, SiLPA, dan Perubahan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran Di Kota Palembang. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., D Iv, 2013–2015.

McVea, F. dan. (2001). Stakeholder Theory.

Ningtyas, W. P. M. (2020). **Pengaruh Regulasi, Politik Anggaran, Perencanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia, Pengadaan Barang/Jasa, Dan Pelaksanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran Belanja (Studi Empiris di OPD Kabupaten Magelang)**. Skripsi Universitas Muhammadiyah Magelang.

Oktaliza, Y., Ahyaruddin, M., & Putri, A. M. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau. *Muhammadiyah Riau Accounting and Business Journal*, 1(2), 081–090. <https://doi.org/10.37859/mrabj.v1i2.1918>

Pasaribu, R. (2021). Wali Kota Tebing Tinggi: Serapan Anggaran Kurang Optimal Bisa Menghambat Pembangunan. Palapos.Co.Id. <https://palapapos.co.id/listing/view/3072/4/wali-kota-tebingtinggi-serapan-anggaran-kurang-optimal-bisa-menghambat-pembangunan>

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008, 11 23 (2008). [http://www.desarrollosocialyfamilia.gob.cl/storage/docs/Informe\\_de\\_Desarrollo\\_Social\\_2020.pdf%0Ahttp://revistas.ucm.es/index.php/CUTS/article/view/44540/44554](http://www.desarrollosocialyfamilia.gob.cl/storage/docs/Informe_de_Desarrollo_Social_2020.pdf%0Ahttp://revistas.ucm.es/index.php/CUTS/article/view/44540/44554)

- 
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019, (2019).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, 1 (2020).
- Pramudya, Y. (2021). Analisis Serapan Anggaran Pada Instansi Badan Layanan Umum. **Jurnal Indonesia Sosial Teknologi**, 4(1), 6.
- Rambe, N. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kota Binjai Dengan Perubahan Anggaran Sebagai Variabel Moderating. **Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota**, 1(3), 82–91.
- Sanjaya, T. (2018). Pengaruh Regulasi Keuangan Daerah, Politik Anggaran Dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Terhadap Penyerapan Anggaran Pada OPD Provinsi Sumatera Barat. **Akuntansi**, 2(4), 2–9.
- Saputra, D. (2021). BPKPD adakan Rapat Koordinasi Percepatan penyerapan Anggaran Belanja Daerah dan Realisasi PAD. *Bisnis.Com*.  
<https://ekonomi.bisnis.com/read/20210721/10/1420313/penyerapan-anggaran-daerah-rendah-sri-mulyani-sebutkan-sanksinya>
- Sugiyono. (2019). **Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D**. (25th ed.). Alfabeta.
- Syahwildan, M., & Damayanti, & I. (2021). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Di Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi. **Ikraith-Ekonomika**, 5(1), 169–176.